



**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD)  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

**KEGIATAN  
11 JANUARI – 25 JANUARI 2021**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

***BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT  
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”***

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI**

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	<b>KOMISI I</b>	<p>1. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang PDP Komisi I DPR RI dengan Tim Panja Pemerintah. Pembahasan RUU PDP dalam Rapat Panja akan dilanjutkan setelah Rapat Paripurna menetapkan RUU PDP menjadi RUU Prioritas Tahun 2021.</p> <p>2. Terkait fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Sekjen Kemkominfo mengenai Pembentukan Pansel Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026. Keputusannya:</p> <p>a) Komisi I DPR RI meminta kepada Pansel Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 dalam rangkaian proses tahapan seleksi dilakukan secara ketat, cermat, independen, adil, serta membuka ruang partisipasi publik, untuk menghasilkan Calon Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 yang berkualitas, berintegritas, tidak terpapar oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta professional.</p> <p>b) Meminta Pansel menyertakan track record atau rekam jejak dari 15 nama Calon Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026 yang diserahkan oleh Menteri Kominfo RI kepada Presiden RI sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Pimpinan Komisi I DPR RI telah menghadiri Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan AKD lainnya dengan Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, Panglima TNI,</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		Kapolri, Kepala BIN, Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pimpinan KPK, terkait dengan Isu-isu aktual, pelaksanaan dan penggunaan Dana Otsus, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021
2.	<b>KOMISI II</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini Komisi II DPR RI sedang melakukan sejumlah RUU penyesuaian yang dasar pembentukannya dibuat di zaman RIS. Terdapat 13 RUU dan satu diantaranya yakni RUU tentang Provinsi Bali telah diselesaikan sebelumnya oleh Badan Keahlian DPR. Adapun saat ini 12 RUU tentang Provinsi lainnya yang juga merupakan RUU Kumulatif Terbuka berdasarkan RDP dengan Badan Keahlian DPR RI sedang disusun. RUU tersebut yakni RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi NTT, RUU tentang Provinsi NTB, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara.</li> <li>2. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dilakukan RAKER TK I Ke-1 RUU ASN dengan MENPAN RB, MENKEU, MENDAGRI dan MEKUMHAM. Adapun pada saat ini pemerintah memandang masih belum perlu melakukan perubahan terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</li> <li>3. Melakukan rapat kerja/rapat dengar pendapat terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan rapat tersebut diperoleh informasi yakni masih terdapat pelanggaran dan sengketa Pilkada, masih adanya indikasi praktik Politik Uang (<i>Money Politic</i>), masih ditemukan permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap, pelanggaran Netralitas ASN, Polri/TNI, dan masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar Penyelenggara Pemilu.</p> <p>4. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Pemekaran Papua (Se-Tanah Tabi dan Saireri) dan Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.</p> <p>5. Pada tanggal 26-27 Januari 2021 sedang dilakukan <i>fit and proper test</i> calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Adapun pada tanggal 28 Januari 2021 Komisi II DPR RI telah memilih dan menetapkan 9 (sembilan) calon yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Ombudsman yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mokh Najih, Dr., SH., M.Hum (Ketua);</li> <li>2) Bobby Hamzar Rafinus, Ir.,MIA (Wakil Ketua)</li> <li>3) Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP.,M.IP;</li> <li>4) Hery Susanto, S.Pi.,M.Si</li> <li>5) Indraza Marzuki Rais</li> <li>6) Jemsly Hutabarat, Ir., SH.,MM</li> <li>7) Johannes Widiantoro, Dr., SH., MH</li> <li>8) Robertus Na Endi Jaweng</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		9) Yeka Hendra Fatika, SP
3.	<b>KOMISI III</b>	<p>1. Menindaklanjuti penugasan Bamus untuk membahas Surat Presiden perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, dilakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RDP dengan PPATK membahas hasil pemantauan dan penelusuran keuangan Calon Kapolri, dan disimpulkan tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan dari rekening Calon Kapolri.</li> <li>b. RDPU dengan Kopolnas membahas rekam jejak Calon Kapolri, dan diperoleh informasi tidak terdapat hal-hal yang patut dipermasalahkan dari Calon Kapolri.</li> <li>c. Uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) Calon Kapolri yang menyampaikan makalah dan paparan dengan judul “Transformasi menuju Polri yang PRESISI (prediktif, responsibilitas, dan tranparansi berkeadilan).</li> </ol> <p>2. Komisi III secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>
3.	<b>KOMISI IV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IV DPR RI menunggu keputusan Badan Legislasi terkait usulan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk disetujui RUU Prioritas Tahun 2021.</li> <li>2. RDP Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan (14 Jan 2021). Butir penting dalam rapat tersebut adalah:</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. KLHK diminta untuk menyiapkan data penggunaan dan penutupan lahan pada kawasan hutan serta kewajiban PNBP tertunggak bagi pemegang izin usaha di dalam kawasan hutan.</p> <p>b. KLHK mendorong agar dalam RPP Bidang Kehutanan sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang membidangi Kehutanan.</p> <p>c. KLHK didorong untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); serta pembayaran PNBP yang menjadi kewajiban pemegang izin usaha di dalam kawasan hutan. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.</p> <p>d. KLHK didorong untuk melakukan penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Beberapa butir rapat di atas akan ditindaklanjuti dalam Raker Menteri LHK terkait isu aktual Bencana Banjir dan Longsor di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu terakhir.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. RDP Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, NTT dan Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati (14 Jan 2021). Butir penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memperhatikan prinsip-prinsip dasar konservasi, serasi dengan keseluruhan lanskap, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mengatur (membatasi) interaksi pengunjung dengan komodo atau satwa liar lainnya (<i>as wild as possible</i>).</li> <li>b. KLHK didorong untuk Kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.</li> <li>c. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia.</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>d. KLHK didorong untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengatur kebijakan perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat PNBPN atas pengelolaan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional, melalui peraturan pelaksana dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional.</p> <p>4. Untuk Bidang Pangan dan Pertanian, Komsis DPR RI telah melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RDP Situasi dan Kondisi Pangan serta Isu Aktual Lainnya (13 Januari 2021).</li> <li>✓ RDP Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penggunaan Kartu Tani Tahun 2020 serta Rencana Tahun 2021 (18 Januari 2021).</li> <li>✓ RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, membahas: Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura (19 Januari 2021).</li> <li>✓ RDP dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dirut BPDPKS, dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, membahas: Penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (20 Januari 2021), serta</li> <li>✓ Raker dengan Menteri Pertanian, membahas: Evaluasi Kegiatan 2020, Rencana Pemotongan, <i>Refocusing</i> dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, serta Strategi Kegiatan Tahun 2021 (25 Januari 2021).</li> </ul>



NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Butir penting dalam rapat-rapat tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam rapat, Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola komoditas kedelai termasuk didalamnya mewajibkan importir untuk menyediakan bibit kedelai bagi petani kedelai.</li> <li>b. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Pemerintah untuk memisahkan wilayah penanaman bawang putih baik penanaman yang berasal dari APBN maupun wajib tanam importir berdasarkan RIPH. Selanjutnya pemisahan itu dilakukan dengan memisahkan kabupaten/kota dan maksimal 3 (tiga) hamparan.</li> <li>c. Komisi IV DPR RI menyayangkan adanya kenaikan HET pupuk bersubsidi ditengah pandemi Covid-19 dan Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap alternatif pemberian subsidi yang paling baik untuk mengganti subsidi pupuk yang bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.</li> <li>d. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani untuk dapat memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi yang memadai serta tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang masih dan belum memiliki sarana teknologi.</li> <li>e. Komisi IV DPR RI juga meminta kepada Pemerintah untuk memiliki <i>Big Data</i> agar tidak selalu mengubah E-RDCK setiap tahunnya. Disamping itu, Komisi IV DPR RI juga meminta</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>kajian alternatif pupuk bersubsidi yang terbaik sehingga dapat dirasakan sepenuhnya oleh petani.</p> <p>f. Komisi IV DPR Ri juga mendukung penurunan harga gas sehingga dapat menekan HPP pupuk bersubsidi.</p> <p>g. Dibutuhkan perbaikan atau membuat peraturan baru terkait dengan kewajiban importir bawang putih agar memiliki gudang pendingin.</p> <p>h. Pemerintah diminta untuk merumuskan kembali pemisahan antar Kabupaten penanaman bawang putih antara yang berasal dari APBN dan yang berasal dari wajib impor (RIPH). Serta Pemerintah agar merumuskan kebijakan perubahan wajib tanam dengan pemberian benih/bibit bawang putih.</p> <p>i. Kegiatan impor produk hortikultura dinilai tidak melihat aspek produksi dalam negeri sehingga menyebabkan buah impor marak di pasar.</p> <p>j. Pemberian dana 30 juta/Ha yang diberikan oleh BPDPKS selama ini tidak cukup sampai masa panen (4 tahun) sehingga dibutuhkan tambahan anggaran.</p> <p>k. Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 yang sangat besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp6,3 Triliun. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian target-target</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>produksi, serta menghitung ulang rincian anggaran program dan kegiatan peningkatan produksi sehubungan dengan terjadinya pemotongan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Pertanian diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh kegiatan <i>food estate</i> tahun 2020 dan melakukan perencanaan ulang kegiatan <i>food estate</i> tahun 2021 dengan cermat agar tidak terjadi kegagalan dan hasilnya berdampak signifikan terhadap produksi nasional.</li> <li>m. Meminta kepada Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk memastikan SK Dinas Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Pupuk Bersubsidi telah disahkan oleh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan melarang distributor/kios menjual pupuk dalam bentuk paket penjualan subsidi dan subsidi lain (saprodi) maupun subsidi dan non subsidi, sesuai dengan E-RDKK. Apabila masih terjadi pelanggaran maka PIHC akan mencabut izin serta melanjutkan proses hukum.</li> <li>n. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk mengubah ketentuan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian menjadi lebih fleksibel, tidak hanya diberikan kepada Gapoktan/Poktan tetapi juga diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum.</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>o. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk menyusun kebijakan dan <i>grand design</i> pengembangan Kedelai nasional secara komprehensif dari mulai budi daya sampai dengan industri dan agribisnis hilirnya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengatur tata kelola dan importasi komoditas kedelai yang memotivasi petani untuk menanam komoditas kedelai.</p> <p>p. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk merekomendasikan BumDes/Koperasi sebagai penyalur Pupuk Bersubsidi.</p>
4.	<b>KOMISI V</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan RUU Jalan menunggu belum ada kegiatan karena masih menunggu Surat Presiden tentang pihak-pihak yang mewakili Pemerintah dalam membahas RUU Jalan dengan DPR RI, serta selanjutnya menunggu penentuan Komisi yang akan ditunjuk DPR RI untuk membahas bersama Pemerintah.</li> <li>2. Pada awal Masa Sidang III, melakukan pengawasan lapangan (<i>on the spot</i>) ke Posko Terpadu Musibah Jatuhnya Sriwijaya Air SJ82 di JICT Tanjung Priok Jakarta terkait perkembangan/progress penanganan jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengagendakan rapat khusus tentang Laporan Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya SJ182 yang direncanakan digelar pada tanggal 3 Februari 2021.</li> <li>3. Pada 18 Januari 2021, Raker dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/KemenDPDTT tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Membahas Program Kerja KemenDPDTT Tahun 2021, yang menyoroti antara lain:</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. Meminta agar pendanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2020 yang bersumber dari PHLN yang tidak teralisasi tidak terulang kembali pada tahun 2021 dan meminta KemenDPDTT untuk berkoordinasi dengan pihak donor dan Bappenas mengenai prediksi kendala teknis pelaksanaan pada program/kegiatan TA 2021 sehingga tidak mengganggu kinerja tahun berjalan.</p> <p>b. Meminta KemenDPDTT untuk lebih transparan dalam perhitungan besaran honor tenaga pendamping desa, serta ketentuan dan/atau tata cara penentuan daerah yang akan diintervensi pada program/kegiatan tahun 2021.</p> <p>4. Pada 21 Januari 2021, Raker dengan Menteri PUPR tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Membahas Program Kerja KemenPUPR Tahun 2021, yang menyoroti antara lain:</p> <p>a. Meminta Kementerian PUPR untuk mengambil langkah-langkah strategis agar permasalahan pendanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2020 yang bersumber dari dana blokir, sisa lelang serta kegiatan PHLN dan SBSN yang tidak teralisasi tidak terulang kembali pada tahun anggaran 2021.</p> <p>b. Terkait dengan bencana alam yang terjadi beruntun di berbagai daerah, meminta Kementerian PUPR agar meningkatkan dukungan program/kegiatan baik pada saat tanggap darurat, rekonstruksi, maupun rehabilitasi terhadap daerah terdampak bencana, dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi longsor di jalan nasional serta jalan tol.</p> <p>c. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan tahun anggaran 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program/kegiatan Padat Karya Tunai yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.</p> <p>d. Mendorong Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah konservasi air.</p> <p>e. Mendesak Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi di peta area terdampak lumpur Sidoarjo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>5. Pada 25 Januari 2021, Raker dengan Menteri Perhubungan tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dan Membahas Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021, yang menyoroti antara lain:</p> <p>a. Komisi V DPR RI prihatin terhadap besarnya angka pemotongan dan refocusing/realokasi APBN TA 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-30/MK.02/2021 sebesar Rp. 12,44 Triliun (27,22% dari total pagu anggaran Rp.45,66 Triliun) yang dapat mengganggu program/kegiatan dalam target Renstra maupun RPJMN. Selanjutnya Komisi V DPR RI melalui Anggota Komisi V DPR RI yang ada di Badan Anggaran DPR RI akan membicarakan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>kembali dengan Kementerian Keuangan terkait besaran pemotongan anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan tahun anggaran 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program/kegiatan Padat Karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.</p> <p>c. Mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan tindakan preventif/mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhadap aset strategis Kementerian Perhubungan seperti bandara, pelabuhan, jalur kereta api dan terminal.</p> <p>d. Meminta Kementerian Perhubungan untuk mendukung kegiatan dan program yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas, misalnya reaktivasi rel kereta api, menambah jumlah rambu-rambu dan penerangan jalan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL).</p>
5.	<b>KOMISI VI</b>	<p>1. <b>Rapat Dengar Pendapat Selasa, 19 Januari 2021</b> dengan Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS) terkait Pelaksanaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2020 oleh masing-masing lembaga.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. <b>Rapat Kerja, Rabu, 20 Januari 2021</b> dengan Kementerian BUMN terkait Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau Kebijakan pemerintah dalam Penyampaian realisasi penyerapan anggaran TA 2020 dan Pembahasan Pelaksanaan Pemberian Vaksin (Masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut).</p> <p>3. <b>Rapat Kerja, Kamis, 21 Januari 2021</b> dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau Kebijakan pemerintah dalam Penyampaian realisasi penyerapan anggaranTA 2020 dan Penyampaian rencana Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021.</p>
6.	<b>KOMISI VII</b>	<p>1. RDP dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Presdir PT Chevron Pacific Indonesia membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses peralihan Blok Rokan di Riau agar produksi migas di Blok Rokan tidak turun.</li> <li>b. Progress pembangunan pipanisasi <i>crude oil</i> dari Blok Rokan ke Dumai.</li> </ul> <p>2. Rapat Kerja dengan Menteri Ristek/BRIN dan dengan menghadirkan LBM Eijkman, serta Kepala LPNK membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Kerja Tahun 2021.</li> <li>b. Program Kementerian Ristek/BRIN serta LPNK Tahun 2021 yang terkait dengan aspirasi masyarakat.</li> <li>c. Evaluasi Kinerja Tahun 2020.</li> </ul>



NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>d. Kepastian dan progress vaksin Merah Putih buatan anak bangsa.</p> <p>3. Rapat Kerja dengan Menteri ESDM membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Poin-poin strategis Program Kerja Kementerian ESDM Tahun 2021.</li> <li>b. Program Kementerian ESDM Tahun 2021 yang terkait dengan aspirasi masyarakat dan evaluasi kinerja Kementerian ESDM Tahun 2020.</li> <li>c. Potensi cadangan Gas Alam dan kebijakan pemanfaatan Gas Alam untuk kepentingan dalam negeri termasuk industri dan pembangkit listrik.</li> <li>d. Strategi dan dukungan kebijakan Menteri ESDM untuk percepatan pengembangan <i>Electronic Vehicle</i> (EV) baterai dan percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).</li> <li>e. Kebijakan Menteri ESDM terkait pengembangan proyek <i>coal to DME</i>, sebagai alternatif penggunaan LPG diwaktu waktu mendatang, baik dari sisi kemandirian energi maupun dari sisi keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.</li> </ul> <p>4. RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Dirut PT PLN (Persero) membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komposisi produksi energi listrik yang dihasilkan Pembangkit Listrik yang dikelola PLN sesuai jenis energi primer Batubara, Gas, BBM dan Energi Terbarukan pada Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, serta proyeksi Tahun 2021 s.d 2024.</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Jumlah beban usaha PLN untuk setiap jenis energi primer Batubara, Gas, BBM dan Energi Terbarukan untuk Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.</li> <li>c. Strategi Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN untuk terjaminnya ketersediaan energi primer gas s.d Tahun 2028 sebagai energi primer kedua terbesar yang digunakan pembangkitan listrik yang dikelola PLN.</li> <li>d. Rencana Dirut PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan untuk penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk 8 tahun mendatang.</li> <li>e. Khusus untuk Dirjen Ketenagalistrikan, penjelasan rencana program Tahun 2021 yang terkait langsung dengan kelancaran ketersediaan energi listrik di Indonesia.</li> </ul> <p>5. RDP dengan Dirjen Minerba dan Ketua Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil evaluasi pelaksanaan surveyor terkait verifikasi kualitas dan kuantitas biji nikel.</li> <li>b. Kewenangan perizinan pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Pusat. Progres terkait pembangunan <i>smelter</i>.</li> </ul>
7.	<b>KOMISI VIII</b>	<p>1. Rapat Internal Panja RUU Penanggulangan Bencana untuk membahas dan menyetujui program dan kegiatan berikut: pembahasan DIM, pembentukan Timsin dan Timus, serta pengesahan RUU. Untuk RUU Kesejahteraan Lanjut Usia, masih menunggu proses harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Raker dengan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2020 serta membahas isu – isu aktual dan solusinya.</p> <p>3. Raker dengan Menteri Sosial RI dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2020 serta membahas isu – isu aktual dan solusinya.</p> <p>4. Raker dengan Kepala BNPB dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2020 serta membahas isu – isu aktual dan solusinya.</p> <p>5. Kunker Spesifik ke Jawa Barat (Kab. Sumedang) untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait dengan kebijakan pascabencana, anggaran bencana, dan penyaluran bantuan.</p>
8.	<b>KOMISI IX</b>	<p>1. Melakukan Raker dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta Direktur Utama PT Biofarma mengenai ketersediaan vaksin yang dimiliki Indonesia, termasuk proses pengadaan dan distribusinya serta rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.</p> <p>2. Melakukan Raker dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Jaminan sosial BPJS TK.</li> <li>b. <i>Grand design</i> Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, termasuk mekanisme dan manfaat bagi pekerja dalam program jaminan sosial.</li> <li>c. Perkembangan peraturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>d. Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. Melakukan RDPU dengan <i>Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)</i>, Komnas Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Universitas Padjajaran, dan WHO untuk meminta masukan terkait manajemen vaksinasi di Indonesia yang lebih baik.</p> <p>4. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2021 dan melalui surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM Nomor: PW/00770/DPR RI/I/2021 tertanggal 19 Januari 2021, Komisi IX DPR RI telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat. Atas dasar itulah Komisi IX DPR RI melakukan uji kelayakan (<i>fit and proper test</i>) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2021 – 2026 pada tanggal 26 Januari 2021.</p>
9.	<b>KOMISI X</b>	<p>1. Pada masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Periode tanggal 11 s.d 23 Januari 2021 Komisi X melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Draf RUU sudah dikirimkan ke Baleg pada MP II TS 2020-2021 untuk dilakukan Harmonisasi. Saat ini menunggu penjadwalan oleh Baleg untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep RUU.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Tentang Praktik Psikologi berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/00074/DPRRI/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021 RUU Tentang Praktik Psikologi. Akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat internal Komisi X DPR RI.</p> <p>3. Mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk membahas keputusan DPD RI terkait RUU Usul Inisiatif Tentang Keolahragaan, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/00075/DPRRI/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021. Akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat intern Komisi X DPR RI.</p> <p>4. Realisasi anggaran Kemenpora RI pada APBN TA 2020 terealisasi sesuai target. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI agar program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang ditunda/direvisi akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dapat dilaksanakan pada tahun 2021. Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI juga sepakat untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, supaya ada kepastian terhadap pelaksanaan berbagai Kompetisi Liga Olahraga Nasional.</p> <p>5. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI agar persiapan sebagai Tuan Rumah Piala Asia FIBA (<i>Asian FIBA Cup</i>) Tahun 2021 dan Piala Dunia FIBA (<i>FIBA Basketball World Cup</i>) Tahun 2023 dilaksanakan lebih maksimal supaya tercapai sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.</p> <p>6. Rapat dengan Kemendikbud dengan agenda Realisasi Anggaran pada APBN TA 2020 dan Isu-isu Strategis Butir penting dalam kegiatan itu adalah:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. Realisasi anggaran Kemendikbud RI pada APBN TA 2020 tidak terealisasi sesuai target, dimana Komisi X DPR RI mencatat bahwa daya serap anggaran Kemendikbud RI pada Tahun Anggaran 2020 mencapai 91,61% (belum teraudit) atau sebesar Rp79.003.802.736.000,- (<i>tujuh puluh sembilan triliun tiga miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah</i>) di bawah rata-rata daya serap nasional 94,60% dan target awal yang ditentukan Kemendikbud RI yaitu 97,21%.</p> <p>b. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI segera berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun skema kebijakan afirmatif dan opsi lain yang memungkinkan sesuai ketentuan perundang-undangan, bagi guru dan tenaga kependidikan honorer dengan mempertimbangkan lama pengabdian dalam proses perencanaan dan pengadaan ASN baik dalam formasi CPNS maupun PPPK. Dan melaporkan kepada Komisi X DPR RI paling lambat tanggal 21 Maret 2021.</p> <p>c. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI mengupayakan adanya BOPTS (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta).</p> <p>d. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk menyusun konsep Asesmen Nasional secara komprehensif, termasuk substansi mengenai pemetaan potensi timbulnya <i>learning loss</i> yang mengurangi kemampuan numerasi dan literasi.</p> <p>7. Panja Peta Jalan Pendidikan masih berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir masa persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Diantara isu yang menonjol:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Jalan Pendidikan yang sedang disusun oleh Kemendikbud RI belum memiliki landasan hukum yang kuat dan belum memiliki Naskah Akademik.</li> <li>b. Peta Jalan Pendidikan yang sedang disusun oleh Kemendikbud RI masih perlu didekonstruksi baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.</li> <li>c. Kemendikbud belum melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan seperti organisasi Pendidikan, dan organisasi keagamaan dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan</li> </ul> <p>8. RDPU dengan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan Guru dan Tendik Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas meminta agar diberikan afirmasi dalam pengangkatan menjadi ASN atau PNS.</p>
10.	<b>KOMISI XI</b>	<p>1. Pada Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi, telah disepakati hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri Keuangan agar segera menyampaikan <i>roadmap</i> atau <i>business plan</i> Lembaga Pengelola Investasi (LPI).</li> <li>b. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Menteri Keuangan membangun LPI untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang profesional, <i>good governance</i>, memiliki kinerja komersial dan manfaat pelayanan publik yang seimbang, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.</li> <li>c. Menteri Keuangan selaku Pembina dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menyampaikan aset-aset yang merupakan pengelolaan cabang-cabang produksi yang</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan aset-aset pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dibahas bersama Komisi XI DPR RI.</p> <p>d. Menteri Keuangan agar segera membuat syarat dan ketentuan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kerjasama LPI dan Pemerintah untuk optimalisasi aset negara melalui kuasa kelola dan/atau bentuk kerjasama lainnya tanpa melalui pemindahtanganan aset, agar tetap menempatkan kekuasaan Pemerintah dalam melakukan fungsi pengelolaan, pengurusan, pengaturan, dan pengawasan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>ii. Kriteria sektor dan jenis usaha perusahaan patungan tertentu, yang mensyaratkan agar LPI memiliki porsi kepemilikan mayoritas, menjadi penentu utama kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan.</li> <li>iii. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berkaitan dengan perlakuan perpajakan dalam transaksi LPI untuk dikonsultasikan dengan Komisi XI DPR RI.</li> </ol> <p>2. Melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. PLN (Persero), PT. BPUI (Persero), LPEI dan PIP membahas PMN terhadap BUMN dan BLU</p>
11.	<b>BADAN LEGISLASI (BALEG)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan jadwal rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.</li> <li>2. Pembahasan dan Penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan daftar RUU Prolegnas Tahun 2020-2024.</li> </ol>



NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pemilihan Umum, dengan beberapa narasumber sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ramlan Surbakti;</li> <li>b. Nur Hidayat Sardini;</li> <li>c. Kacung Marijan;</li> <li>d. Topo Santoso; dan</li> <li>e. Titi Anggraeni.</li> </ul> <p>4. Rapat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.</p> <p>5. Kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka tugas pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p>
12.	<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)</b>	<p>1. Rapat Intern, 12 Januari 2021 Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS 3 TS 2020-2021</p> <p>2. Rapat BURT, 14 Januari 2021 Agenda: Penyerahan Daftar Isian Dokumen Anggaran (DIPA) AKD Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh AKD diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pelaksanaan DIPA Tahun 2021 agar kinerja realisasi anggaran Tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya.</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Pengaturan akses (keluar/masuk) khususnya gedung Nusantara 1 perlu diperketat melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang sudah ada sehingga lebih tertib. Oleh karena itu, perlu kerjasama seluruh pihak.</p> <p>3. Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan pelayanan Jamkestama untuk Anggota DPR beserta keluarganya.</p>
13.	<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)</b>	<p>6. Kunjungan kerja ke Kabupaten Tangerang dalam rangka memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema kebijakan pengelolaan subsidi energi (14-16 Januari 2021).</p> <p>7. Kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang dalam rangka memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas penelaahan BAKN DPR RI dengan tema pengelolaan subsidi energi (18-20 Januari 2021)</p> <p>8. Finalisasi laporan penugasan Pimpinan DPR RI terkait penelaahan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaannya (Selesai pada Masa Sidang III 2020/2021)</p>
14.	<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)</b>	<p>1. Membahas draft Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.</p> <p>2. Merencanakan kegiatan Seminar Nasional yang akan dilakukan secara fisik dan virtual dengan dihadiri oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		3. Melakukan kunjungan kerja ke Polresta, Kejari, dan DPRD Kota Bogor, serta Universitas Pakuan dalam rangka mencari masukan dan evaluasi terhadap Kode Etik

---

**Keterangan : Info Dwi Mingguan Dikelola oleh Tim Gabungan / Sinergi antara Badan Keahlian, Para Kabag Set AKD Deputi Persidangan, dan Tenaga Ahli AKD**

---